

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cetakan ke-1, Erlangga, Jakarta.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asrun, Muhammad, 2003, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- , 2006, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Effendi, Masyur dan Evandri, Taufani Sukamana, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fuady, Munir, 2009, *Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Gandasubarta, Purwoto S., 1984, *Tugas Hakim Indonesia, dalam Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H.*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gultom, Binsar, 2009, *Pelanggaran HAM dalam Keadaan Darurat di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gultom, Erikson Hasiholan, 2006, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Timor Timur*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2010, *Pengadilan atas Beberapa Kajahatan Serius terhadap HAM*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

- Kansil, C. S. T. dan Kansil, Christine S. T. S., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, 2003, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Reflika Aditama, Bandung.
- , 2011, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Rangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, PT. Alumni, Bandung.
- N.D, Mukti Fajar, dan Ahmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurdjana, Igm, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Palmer, Vernon Valentine, 1999, *Lousiana Microcosm or A Mixed Jurisdiction*, Thomas Pickles Professor of Law Tulane University Carolina Academic Press, Durham North Carolina.
- Pangaribuan, Luhut MP., 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, CV. Yrama Widya, Bandung.
- Pope, Jeremy, 2007, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ranuhandoko, I.P.M., 2006, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang dan Puspitasai, Sri Hastuti, 1997, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Tumpa, Harifin A., 2010, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Roma Statute Of The International Criminal Court*, 17 Juli 1998).

C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet

Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, 2014, *Pengarusutamaan Norma-Norma HAM Internasional dalam Hukum Pidana Internasional*, Jakarta.

- Eddy O.S Hiariej, 2009, “Asas Legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- ELSAM, 2007, *Ekspose Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan HAM Abepura dan Timor- Timur*, Jakarta.
- Ester Natalia, 2010, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* Terhadap Prinsip Asas Legalitas”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Komisihukum.go.id, */files/hasil/2004, Laporan Penelitian Hakim Ad Hoc dalam Peradilan Niaga*, di akses tanggal 27 Januari 2015.
- Moh. Koesno, 1996, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945*, Varia Peradilan tahun XI Nomor 129 Juni 1996, IKAHI, Jakarta.
- Papua Post, 2003, *Surat Terbuka Koalisi untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)*, tanggal 21 November 2003.
- RB. Sularto, 2010, “Pembentukan dan Pengaturan Substansi Pengadilan HAM *Ad Hoc* Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Redaktur, [http://m.kompasiana.com, post/read/458320/1/dinamika-hakim-ad-hoc-dan-hakim-karir.html](http://m.kompasiana.com/post/read/458320/1/dinamika-hakim-ad-hoc-dan-hakim-karir.html), di akses tanggal 10 Oktober 2014.
- Siaran Pers Koalisi, 2002, *Proses Penyidikan Kejaksaan Agung Terhadap Insiden Traumatis Abepura 7 Desember 2000, Dalam Mencegah Musnahnya Penghormatan Terhadap Jiwa Kehidupan Masyarakat Papua: Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Abepura 7 Desember 2000*, Jakarta.